



Analisis Kelayakan Model Pembelajaran pada Satuan PKBM dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Asep Saepudin

Ade Sadikin

Iip Saripah

Departemen Pendidikan Masyarakat

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

aspudin@gmail.com

Abstract

The Community Learning Activity Center (PKBM), is one of the proven pathways of education to consistently provide educational services to the community. However, in its development it is faced with all the dynamics and various problems that need to be intervened by universities through the development of a learning management model as appropriate. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The data collection techniques used in this study consisted of: documentation study; study of literature; Interview; and focus group discussions (FGD). The research subjects were managers and tutors, as well as PKBM students who were in the Greater Bandung area, with a research time of six months. The results of the study, (1) the conceptual model developed consists of rationalization, assumptions, objectives, components, indicators and model procedures, (2) model validation is carried out using two methods, namely discussion with peers (peer group) and expert judgment. (3) implementation of the feasibility trial of the model described in learning activities at PKBM. The steps of the learning trial as a component of the model are the process of planning, organizing, implementing and evaluating learning. The conceptual model developed shows effective results, with indicators: first, there is active involvement and positive responses of students to learning activities Second, there is an increase in the ability of students.

Keywords: Management Strengthening, PKBM, Service Quality, Non-Formal Education

Abstrak

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), merupakan salah satu jalur Pendidikan yang telah teruji dapat memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat secara konsisten. Namun demikian, dalam perkembangannya dihadapkan dengan segala dinamika dan ragam permasalahan yang perlu diintervensi oleh perguruan tinggi melalui pengembangan model pengelolaan pembelajaran sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas: studi dokumentasi; studi literatur; wawancara; dan kelompok diskusi terfokus (FGD). Subjek penelitian adalah pengelola dan tutor, serta peserta didik PKBM yang berada di wilayah Bandung Raya, dengan waktu penelitian selama enam bulan. Hasil penelitian, (1) model konseptual yang dikembangkan terdiri atas, rasionalisasi, asumsi, tujuan, komponen, indikator, dan prosedur model, (2) validasi model dilakukan dengan menggunakan dua cara yakni diskusi dengan teman sejawat (peer group) dan penilaian para ahli (expert judgement). (3) implementasi uji coba kelayakan model dideskripsikan dalam kegiatan pembelajaran di PKBM. Langkah-langkah uji coba pembelajaran sebagai komponen model adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran. Kesimpulan model yang dikembangkan menunjukkan hasil yang efektif, dengan indikator: pertama, adanya keterlibatan aktif dan tanggapan positif peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Kedua, terdapat peningkatan kemampuan pada peserta didik.

Kata Kunci: Penguatan Manajemen, PKBM, Mutu Layanan, Pendidikan Non Formal

Article Info

Naskah Diterima :
2020-10-07

Naskah Direvisi:
2020-11-17

Naskah Disetujui:
2020-12-13

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dimaknai sebagai institusi sekaligus proses dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era revolusi industri 4.0 serta perubahan perkembangan dunia yang semakin menglobal. Untuk itu, UNESCO telah menerapkan empat pilar belajar, yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Live Together*, *learning to Be*.

Pada *learning to know* terkandung makna bagaimana belajar, *learning to do* mengandung dimensi kecakapan hidup manusia, *learning to live together* mengandung dimensi kehidupan multikultural, dan *learning to be* mengandung makna belajar untuk mengenal jati diri, kemampuan dan kelemahan serta kompetensi yang dikuasai untuk membangun kehidupan yang utuh secara terus-menerus.

Penerapan 4 pilar belajar UNESCO (2005) yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Live Together*, *learning to Be*, melahirkan konsep revolusi belajar. Model pembelajaran modern, yaitu melatih para peserta didik untuk menjadi sumber belajar, mengubah model belajar pasif (*passive learning*) menjadi belajar aktif (*active learning*), mengubah model berpikir fakta (*factual thinking*) menjadi berpikir kritis (*critical thinking*), dari kurang aktif memberi respons menjadi proaktif memberi respons, dari berpikir abstrak menjadi autentik. Perubahan ini, menempatkan peranan pendidikan non formal dalam posisi yang strategis.

Menurut Sihombing (1999) pendidikan luar sekolah bukan hanya sebagai lembaga pendidikan dalam masyarakat tetapi juga merupakan program strategis yang responsif dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan alur pemikiran diatas, implementasi program belajar dalam PKBM merupakan pendekatan pendidikan (*educational approach*) pada jalur pendidikan non-formal yang didasarkan kepada konvergensi kebutuhan belajar (*learning needs*) dengan sumber belajar (*learning resourch*) dalam masyarakat, yang membentuk suatu sistem belajar. Sebagai suatu sistem belajar PKBM dibangun atas lima komponen berikut: (1) kebutuhan belajar, (2) sumber belajar, (3) program pembelajaran, (4) kelompok belajar/wadah pembelajaran, dan (5) fasilitator kegiatan belajar.

Terminologi yang berkaitan dengan PKBM yaitu: Pusat, bermakna pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai program layanan PKBM pada satu tempat. Pemusatan manajemen penyelenggaraan PKBM, terutama dalam hal pemecahan masalah dan pendayagunaan sumberdaya. Kegiatan belajar, setiap program atau kegiatan layanan PKBM diselenggarakan dalam *setting* pembelajaran sehingga proses dan hasil program dan kegiatan layanan yang diikuti dan diperoleh warga sasaran program harus berdampak kepada perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Masyarakat, merupakan sasaran utama dan sasaran akhir dari setiap program/kegiatan layanan yang dirancang oleh PKBM. Pada sisi lain masyarakat juga merupakan sasaran utama dan sasaran akhir dari fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak luar. Menurut Hikmat, H., (2001) Fasilitasi dan atau pendampingan dari pihak luar masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PKBM diorientasikan kepada penguatan kemampuan masyarakat berperan aktif: (1) sebagai penyelenggara atas upaya pemenuhan kebutuhan pembelajarannya; (2) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut dengan upaya pening-

katan taraf hidup dan kehidupannya; dan (3) sebagai penggagas serta penggerak bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lain di lingkungan sekitarnya.

Mengingat karakteristik dan *trend* permasalahan pendidikan non formal saat ini mengarah kepada menanganan kebutuhan nyata masyarakat, maka orientasi program PKBM sebagai satuan pendidikan non formal diproyeksikan pada pendidikan masyarakat dengan pendekatan *Community Based Education (CBE)*. Menurut menurut Jalal dan Supriadi (2001) *Community Based Education* menekankan pentingnya pemahaman masyarakat, karakteristiknya, kebutuhannya, kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. Dalam implementasinya CBE merupakan metoda yang menekankan pada cara pemecahan masalah oleh masyarakat, dengan memanfaatkan potensi lingkungan (*to help people to help them self*). *Community Base Education*, dikembangkan bersandar kepada beberapa konsepsi sebagai berikut: Pendidikan sepanjang hayat, Pendidikan kritis yang menekankan perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang ada, serta partisipasi dalam setiap kegiatan, Andragogi, dan *Learning organitation*.

Berdasarkan data empiris, PKBM di wilayah Bandung Raya merupakan PKBM yang telah teruji mampu meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu. Program pendidikan yang diselenggarakan PKBM umumnya adalah program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Program pendidikan anak usia dini, program pendidikan lofe skill (kursus keterampilan), dan pendidikan masyarakat lainnya yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lingkungan masarakat sekitar. Namun demikian, PKBM di wilayah Bandung Raya rata-rata belum sepenuhnya menyelenggaraan pendidikan sesuai standar

nasional pendidikan. Hal ini dikarenakan belum seluruhnya PKBM memiliki kelayakan dilihat dari aspek manajemen penyelenggaraan, standarisasi dan ketertiban administrasi dan kelayakan fisik lembaga sebagai penyelenggara pendidikan.

Sejalan dengan uraian di atas, pada sisi lain upaya untuk mengembangkan pendidikan nasional baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal terus ditingkatkan secara berkelanjutan sebagai implementasi dari komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Kebijakan tentang optimalisasi pendidikan non formal juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan non formal mendapat perhatian lebih dan untuk terus diperkuat sebagai lembaga pendidikan yang telah teruji mampu memberdayakan masyarakat melalui berbagai program pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan alur pemikiran diatas, maka dilakukan penelitian ini dalam rangka untuk Penguatan manajemen PKBM di wilayah Bandung Raya. Harapan besar manfaat dari penelitian ini adalah mampu mengungkap secara empiris terhadap ragam pengelolaan PKBM, standar minimal penyelenggaraan PKBM, dan upaya merumuskan desain konseptual layanan PKBM bermutu yang dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah Bandung Raya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Peneltian ini mengusung kajian teori yang relevan dengan tema penelitian yakni berkenaan dengan: (1) konsep pendidikan

luar sekolah, (2) konsep, tujuan, prinsip, karakteristik, program, standar minimal, serta pengembangan evaluasi PKBM.

Konsep Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Secara teoritis Sudjana dalam [Asep Saepudian \(2015, hlm. 95\)](#) mendefinisikan pendidikan luar sekolah sebagai kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya.

Konsep PKBM sebagai satuan pendidikan luar sekolah mengemuka sejak awal tahun 1990 an, yang dipopulerkan lewat suatu pertemuan para pimpinan negara di dunia. Dalam studinya [Ardiwinata \(2014\)](#) menjelaskan bahwa dalam deklarasi Dunia tentang *Education For All (EFA)*, di Jomtien, Thailand tahun 1990, hampir 155 negara menggagas adanya *Community Learning Centre (CLC)* sebagai cikal bakal munculnya istilah PKBM di Indonesia. [Sihombing dan Gutama \(2000\)](#) memaparkan PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya (desa, kota), agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk me-

ningkatkan taraf hidup dan prestasi belajar masyarakat. Berkenaan dengan itu, masyarakat berpertasi adalah masyarakat yang mau belajar. Laila Hayati (2011) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak pernah melakukan kegiatan belajar.

Tujuan penting dalam pengembangan PKBM menurut [Sihombing dan Gutama \(2000\)](#) adalah pertama, memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri (berdaya), Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, Ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut. [Sihombing \(1999\)](#) menyebutkan bahwa tujuan pelebagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam arti memberdayakan seluruh potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di desa sebagai upaya membelajarkan masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, dengan prinsip pengembangan dalam rangka mewujudkan demokrasi bidang pendidikan.

Tujuan lain dari penyelenggaraan program pendidikan di PKBM adalah untuk meningkatkan kompetensi warga masyarakat sehingga memiliki keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi selama hidupnya. Kompetensi dimaksud hanya akan diperoleh lewat proses belajar yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Menurut [Anwas \(2011\)](#) Kompetensi adalah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikapnya yang dituntut dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Ini berarti hanya masyarakat yang mau belajar yang akan memiliki

kompetensi. Salah satu sarana pe-ningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah melalui belajar pada satuan pendidikan PKBM.

Menurut Sihombing (1999) beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan menyusun program PKBM antara lain adalah: a) program yang dikembangkan PKBM harus meluas sehingga warga belajar memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang berkaitan dengan etika, estetika, logika dan kinestetika pada saat pembelajaran, b) program harus memiliki prinsip keseimbangan (*balanced*) dimana setiap kompetensi yang dikembangkan dalam program PKBM harus dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk sebuah proses pembelajaran yang efektif, c) program yang dikembangkan PKBM harus relevan karena setiap program terkait dengan penyiapan warga belajar untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan, pengalaman, dan latihan dalam berperan dan bersikap secara bertanggung jawab dalam mewujudkan kede-wasaan berfikirnya, d) program yang dikembangkan PKBM harus mampu mengedepankan konsep perbedaan (*differentiated*), prinsip ini merupakan upaya pelayanan individual dimana warga belajar harus memahami, apa yang perlu dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana belajar, dan berbuat untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan dirinya masing-masing secara optimal.

Dalam upaya untuk menjalankan prinsip PKBM sehingga selaras dengan kepentingan dan kemampuan masyarakat, maka perlu dikembangkan standar minimal manajemen penyelenggaraan PKBM yang berbasis masyarakat (*community based*). Tujuan dikembangkannya standar minimal PKBM Standar dan Prosedur Penyeleng-

garan PKBM (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015) adalah: (a) PKBM yang telah terbentuk dapat menyelaraskan dan menyesuaikan proses penyelenggaraannya dengan segenap potensi dan sumber daya disekitarnya dan sekaligus memberikan wawasan terhadap kepentingan pembangunan yang lebih luas; (b) Dapat dijadikan salah satu alat fasilitasi aparat pemerintah dalam pembentukan PKBM oleh masyarakat.

Lingkup Standar Minimal PKBM diukur berdasarkan 8 standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Kedelapan aspek tersebut yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar lulusan, (4) standar pendidik, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelola, (7) standar penilaian, (8) standar pembiayaan. (Pedoman Evaluasi Dikmas, 2015). Merujuk kepada fungsi utama dan pendukung PKBM, paling tidak ada empat bidang kegiatan yang perlu dikelola oleh Pengelola PKBM.

Bidang kegiatan tersebut adalah: *pertama*, Pendidikan, meliputi kegiatan pembimbingan atau penyuluhan, pengajaran dan pelatihan. *Kedua*, Pelayanan informasi, meliputi kegiatan: (1) Menghimpun informasi dari PKBM, masyarakat sekitar, dan lembaga luar, (2) Memberikan layanan informasi kepada masyarakat sekitar dan lembaga luar. *Ketiga*, Jaringan informasi dan kemitraan, meliputi kegiatan: (1) Mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan dengan lembaga yang ada di dalam maupun di luar masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di PKBM maupun di lembaga mitra. (2) Memelihara jaringan yang telah terbina, dan *Keempat*, Pembinaan tenaga kependidikan PKBM, meliputi kegiatan: meningkatkan kualitas kinerja tenaga pengelola dan tenaga pendidik (tutor, nara sumber) baik dilakukan

secara mandiri maupun atas fasilitasi dari luar.

Berkenaan dengan standar minimal penyelenggaraan PKBM, dalam buku [Standar & Prosedur Penyelenggaraan PKBM \(2015\)](#) ditegaskan bahwa berdasarkan fungsi PKBM yang terbagi atas standar manajemen dan standar fisik (sarana dan prasarana), meliputi: *pertama*, Standar minimal manajemen, menguraikan kegiatan minimal yang perlu dilakukan oleh pengelola PKBM agar fungsi PKBM dapat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan pengelolaannya diuraikan berdasarkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, dan penilaian. *Kedua*, Standar minimal sarana fisik, menguraikan sarana dan prasarana penunjang minimal yang perlu disiapkan oleh pengelola untuk digunakan dalam pengelolaan kegiatan PKBM.

Berdasarkan paparan di atas, penyelenggaraan pendidikan dan PKBM sebagai wadah untuk peningkatan seluruh lapisan anggota masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal diperkirakan belum seluruhnya dapat memenuhi harapan sebagai bagian dari pendidikan berbasis masyarakat, karena faktor penunjang maupun kemampuan internal yang belum memadai.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehubungan penelitian ini mengungkap tentang fenomena empirik saat ini ([Sugiyono, 2011](#)). Subjek penelitian yang dijadikan sumber data utama adalah unsur pengelola PKBM, dan unsur Dinas Pendidikan di wilayah Bandung Raya yakni di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Masing-masing wilayah diwakili oleh empat PKBM. Pada Masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan sampelnya 1 (satu)

satuan PKBM. Agar penelitian dapat terfokus dan dilakukan secara mendalam maka yang menjadi subjek penelitian/informan dibatasi jumlahnya dengan pertimbangan informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti, dalam hal ini peneliti menggunakan *purpose sampling* dalam teknik pengambilan sampling. Dengan demikian, dari setiap satuan PKBM, ditetapkan ada satu orang pengelola, satu orang unsur sumber belajar/instruktur, dan dua orang warga masyarakat sebagai peserta didik. Sehingga jumlah informan primer penelitian 12 orang yaitu 3 orang pengelola PKBM dan 3 orang unsur Sumber Belajar dan 6 warga masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Waktu penelitian dilakukan se-lama 6 bulan, yakni pada bulan April-Sep-tember 2020.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disain Model Penguatan Manajemen PKBM di Wilayah Bandung Raya.

Model konseptual yang dikembangkan terdiri atas, rasionalisasi, asumsi, tujuan, komponen, indikator, dan prosedur model. Keenam aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: pertama, Rasionalisasi pengembangan model adalah didasari pemikiran bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang memiliki peran sangat penting dalam pendidikan di masyarakat, terutama di wilayah Bandung Raya. Hal tersebut terbukti dari: (1) animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada lembaga PKBM sangat tinggi, (2) PKBM telah berhasil menjadi lembaga pendidikan alternatif, yakni sebagai pelengkap (suplemen), pengganti (substitusi) dan penambah (*complement*) pendidikan formal sangat efektif. Pada sisi lain, satuan pendidikan PKBM dalam

perkembangannya menghadapi berbagai hambatan terkait dengan kinerja program-program yang dijalankan di dalamnya, diantaranya mutu layanan dan ketersediaan sarana prasarana, pada sebagian besar PKBM selain belum merata juga kondisinya masih relatif kurang baik. Sehingga standar mutu PKBM di berbagai wilayah perlu ditingkatkan sebagaimana mestinya. Untuk terjadinya peningkatan produktivitas dan terpenuhinya mutu layanan PKBM, maka diperlukan penataan mutu dan pengelolaan PKBM khususnya di wilayah Bandung Raya melalui intervensi penerapan model penguatan manajemen PKBM dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat.

Kedua, Asumsi pengembangan model (1) pengelola PKBM disatu sisi memiliki potensi dan peluang yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan PKBM, dan disisi lain dihadapkan pada berbagai kendala

(problem) dalam mengembangkan PKBM yakni keterbatasan fasilitas dan kemampuan pengembangan PKBM. Untuk itu pengelola PKBM tersebut, diharapkan memiliki kompetensi pengelolaan dalam melakukan kegiatan *discovery* terutama berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya serta mencoba memperbaiki kekurangan yang dialaminya.

Ketiga, tujuan pengembangan model ini adalah menawarkan sebuah model penguatan manajemen PKBM bagi pengelola, dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat, yang diorientasikan pada penguatan kompetensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.



Gambar 1
Kegiatan PKBM

Keempat, Komponen model berkaitan dengan prinsip pengelolaan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan: (1) sasaran, (2) bahan belajar, dan (3) sumber belajar. Untuk mengembangkan model dirancang seperangkat instrumen yang melengkapi model, yakni: (1) instrumen dalam proses eksploratif dalam mengidentifikasi kebutuhan konstruksi model sebagai landasan pokok merumuskan rancangan model, (2) instrumen proses implementatif model. Sedangkan unsur program model terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, dan (4) penilaian.

Kelima, Indikator model antara lain: (1) Tumbuhnya kesadaran bagi pengelola PKBM (2) Adanya keterlibatan aktif antar pengelola program pendidikan, pendidik dan peserta didik (warga belajar) yang secara bersama-sama merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai permasalahan dan kebutuhan belajarnya, (3) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan pada satuan PKBM sesuai standar nasional pendidikan. Keenam, Prosedur implementasi model penguatan manajemen PKBM ditempuh melalui empat tahap kegiatan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi).

2. Validasi Model Pengelolaan Pembelajaran PKBM di Wilayah Bandung Raya

Dalam upaya menghasilkan model penguatan manajemen PKBM yang efektif, dilakukan pengujian kelayakan model dalam bentuk pengelolaan pembelajaran yang telah dikonseptualisasikan (model hipotetik) sebelum di implementasikan. Kegiatan uji kelayakan model dilakukan melalui dua tahap yakni tahap analisis kualitas model dan tahap penilaian para ahli (*expert judgement*). *Pertama*, tahap analisis model

dilakukan dengan cara mengkaji terhadap isi (*content*) dan keterkaitan dari setiap aspek model. Analisis terhadap model dilakukan oleh peneliti dan didiskusikan dengan teman sejawat. Kegiatan analisis model ini dilakukan secara sistematis, untuk melihat kelayakan model pengelolaan pembelajaran PKBM sebagai suatu kesatuan yang utuh, saling berhubungan satu aspek dengan aspek lainnya. Tujuan akhir pada tahap ini adalah selain untuk melihat apakah isi model telah memadai, juga apakah hubungan antar aspek yang dikembangkan telah tepat.

Kedua, tahap penilaian para ahli (*expert judgement*) dilakukan dengan cara konsultasi dengan para ahli kurikulum pendidikan, ahli komunikasi, dan praktisi PKBM. Para ahli yang dilibatkan dalam penilaian model adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan model penguatan manajemen PKBM. Proses penilaian para ahli dilakukan dengan menggunakan teknik respon terinci, dimana peneliti menyampaikan konsep model penguatan manajemen PKBM disertai instrumen yang terintegrasi dalam suatu format kepada para ahli yang telah ditetapkan. Para ahli tinggal mengisi pendapatnya pada kolom yang telah disediakan pada format isian.

3. Implementasi Uji Coba Model dalam Pengelolaan Pembelajaran PKBM di Wilayah Bandung Raya

Implementasi uji model dideskripsikan dalam kegiatan pembelajaran di PKBM. Langkah-langkah pembelajaran sebagai komponen model meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran.

Tahap perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh pengelola sebelum melaksanakan seluruh kegiatan pem-

belajaran. Oleh karena itu, pada tahap ini pengelola PKBM selayaknya melakukan perencanaan pembelajaran secara matang dan sistematis. Perencanaan pembelajaran dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, terutama mereka yang terkait dengan kebutuhan dan dampak dari penerapan model ini.

Kegiatan perencanaan dilakukan melalui empat kegiatan, yakni: identifikasi umum kebutuhan belajar, menetapkan kebutuhan belajar berdasarkan porsi terbanyak, identifikasi sumber belajar, dan identifikasi mitra kerjasama. Kegiatan *pertama*, identifikasi kebutuhan belajar (*learning needs*) dilakukan terhadap informan awal yang dipandang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam memberikan informasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang kebutuhan belajar.

Tahap Pengorganisasian ini diarahkan untuk merumuskan: *pertama*, perencanaan pembelajaran berkenaan dengan: (a) tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan umum yaitu peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri, (b) materi pembelajaran yang diarahkan pada materi-materi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan diri warga masyarakat. (c) metoda dan teknik pembelajaran, yang disesuaikan dengan jenis materi yang dipelajari, apakah menuntut teknik ceramah, diskusi, penugasan atau simulasi. (d) media/alat pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari.

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pembelajaran diarahkan dalam suasana atau iklim kegiatan yang interaktif, demokratis dan partisipatif. Sumber belajar yang memiliki kesempatan luas untuk menjadi manager sehingga terjadinya transfer pe-

ngetahuan dan keterampilan dari dirinya atau pihak lain kepada warga masyarakat sebagai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Baik secara sendiri atau melibatkan pihak lain, pendamping atau sumber belajar melakukan kegiatan yang diarahkan untuk membantu atau mpendampingi terjadinya proses belajar warga masyarakat. Sumber belajar belajar diupayakan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri sesuai kebutuhannya.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengobservasi atau pengamatan terhadap beberapa aspek yang menjadi ukuran dari hasil belajar yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai warga belajar atau peserta didik. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan nilai skor rata-rata *pretest* dan *post test* peserta didik. Selain itu evaluasi terhadap pengelola relatif menunjukkan respon dan penilaian yang baik dari peserta didik.

E. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut; (1) model konseptual yang dikembangkan terdiri atas, rasionalisasi, asumsi, tujuan, komponen, indikator, dan prosedur model, (2) validasi model dilakukan dengan menggunakan dua cara yakni diskusi dengan teman sejawat (*peer group*) dan penilaian para ahli (*expert judgement*). (3) implementasi model dideskripsikan dalam kegiatan pembelajaran di PKBM. Langkah-langkah pembelajaran sebagai komponen model adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran. Kesimpulan model yang dikembangkan menunjukkan hasil yang efektif, dengan indikator: pertama, adanya keterlibatan aktif dan tanggapan positif warga masyarakat terhadap kegiatan pembelajaran. Kedua, hasil belajar warga masyarakat

menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas. Oos, M. (2011). *Strategi Pemanfaatan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Kompetensi Penyuluh Pertanian*. Jurnal Teknodik. Jakarta: Pustekom Kemdikbud, Vol. XV No. 2, Desember 2011. ISSN 0854-915X, akreditasi LIPI No. 351/Akred-LIPI/P2MBI/07/2011.
- Ardiwinata, J.S. (2014). *Peran Forum PKBM dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Program PAUDNI di Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. Jurnal Pedagogia. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 1 No. 2, Desember 2014.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jalal, F. & Supriadi, D, (2001) *Pengembangan CBE dalam Lapangan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Hayati, L. (2011). Penerapan Pendekatan Pemecahan Masalah Melalui Belajar dalam Kelompok Kecil Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Kuliah Teori Peluang. Jurnal Teknodik Pustekom Kemdikbud Vol. XVI. No. 2 Juni 2012. ISSN 0854-915X, akreditasi LIPI No. 351/Akred-LIPI/P2MBI/07/2011.
- Saepudin, A. (2015). *Efektifitas Pelatihan dan Efikasi Diri dalam Meningkatkan Perilaku Berwirausaha pada Masyarakat Transisi*. Jurnal Mimbar (Sosial dan Pembangunan). Bandung: P2U LPPM UNISBA, Vol. 31 No. 1. Juni 2015. ISSN: 0215-8175, Terakreditasi Dikti. SK Kemdikbud No. 040/P/2014.
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung*, Azas. Bandung : Falah Production.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methode)*. Bandung : Alfabeta.
- Sihombing dan Gutama (2000). *PKBM dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Sihombing. (1999). *Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Kemdikbud. (2015). *Standar & Prosedur Penyelenggaraan PKBM tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO tahun 2005. *International Eksploratif Paper*. Jakarta: Depdikns: